

### POE-XChange Registron British Color British

## AKUNTABILITAS KINERJA |

						I					
		Fisik	(11)	%8/_66	78.02%	99.44%	92,86%	99.84%	0.00%	99.84%	%00'0
	Realisasi	Keuangan	(10)	19.408.428.000,00	1.008.861.400,00	594.335.000,00	6.598.512.733,00	1.484.721.000,00	0	316.170.733,00	. 0
	Anggaran		(6)	19.450.610.000,00	1.708.875.000,00	606.720.000,00	7.106.103.750,00	1.487.101.000,00	43.853.750,00	566.970.000,00	13.042.000,00
	Dukungan program dan Keciatan		(8)	3 METR Pengembangan SPAM Metropolitan Bandung Raya	4 METR Penyusunan Rencana Induk SPAM Jawa Barat	5 Penyusunan Kebijakan SPAM Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1 METR-Penyusunan Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bandung Raya	2 GCB-Monitoring dan Evaluasi Teknis Pengelolaan Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum	3 SANI-Monitoring dan Evaluasi Teknis Pembangunan Sanitasi Jawa Barat	4 PPP-Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran
Capaian	Terhadap Indikator	Kinerja 2016	(7)				100,98				
Realisasi"	2046	91.07	(9)				65,64				
Target*	9 700	2016	(2)				92				
	Satuan		(4)				%				
	Indikator Kinerja		(3)				Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik				
	Sasaran		(2)				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana	sanitasi yang layak			
	2		Ξ				4				



# DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT III-14



	Fisik	(11)	99.84%	99.84%	0.00%	%86.66	99.62%	81,80%
Realisasi	Keuangan	(10)	1.377.606.000,00	1.556.220,000,00	0	1.076.640.000,00	787.155.000,00	19.705.413.292,00
No. of the state o	Anggaran	(6)	1.409.062.000,00	1.559.053.000,00	160.000.000,00	1.076.880.000,00	790.142.000,00	24.089.676.800,00
Dukungan program dan	Kegiatan	(8)	5 METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Cirebon Raya	6 METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bodebekkarpur	7 Konsep Pembangunan Public Art Work Sister Province Jawa Barat dan Australia Selatan	8 PPP-Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah, dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Palabuhan Ratu	9 PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Capaian Terhadap	Kinerja 2016	(7)						97,44%
Realisasi"	2016	(9)						66,26
Target*	2016	(2)						<i>L</i> 9
S. P. S.	Satuali	(4)						%
indikator Kinorio	indikator Ninerja	(3)						Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan
2000	Oasalan	(2)						
Q.	2	£						





	Fisik	(11)	97.28%	85.20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93,47%	96.64%	99.73%
Realisasi	Keuangan	(10)	2.911.712.798,00	3.188.996.945,00	10.874.259.030,00	1.164.446.646,00	967.314.082,00	598.683.791,00	56.053.108.000,00	29.282.968.000,00	26.770.140.000,00
	Anggaran	(6)	4.441.217.300,00	4.686.980.000,00	11.981.619.500,00	1.264.250.000,00	1.010.690.000,00	704.920.000,00	59.971.877.200,00	32.842.806.000,00	27.129.071.200,00
act money as a second	Dukungan program dan Kegiatan	(8)	1 Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka	2 Pembangunan TPPAS Regional Nambo	3 Pengelolaan TPK Sarimukti	4 Advisory teknis BPSR	5 Penyusunan Rencana Induk Persampahan dan TPPAS Regional Ciayumajakuning	6 Penataan TPA Leuwigajah	Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga	PONPAR Persiapan Pelaksanaan Penyedian Sarana dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Non Permanen Pendukung Venue PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat	2 PONPAR Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016 Jawa Rarat
Capaian Terhadap	Indikator Kinerja 2016	(7)							6,86		1
Realisasi"	2016	(9)							2		
Target*	2016	(2)							2		
	Satuan	(4)							Kawasan		
	Indikator Kinerja	(3)							kawasan Terbuka ang	Publik/Revitalisasi Kawasan	
	Indikat								Luas ka Ruang Te Hijau/Ruang Terbuka	Publik/Re Kawasan	
	Sasaran	(2)							Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di jawa Barat		







	Fisik	(11)	43,93%	11.40%	%69`.26	65.81%	76,71%	0.00%	100.00%	%65'68	100.00%	58,16%
Realisasi	Keuangan	(10)	20.350.900.800,00	1.308.605.350,00	10.260.833.100,00	8.781.462.350,00	11.012.625.515,00	0	11.012.625.515,00	1.336.875.000,00	1.336.875.000,00	42.386.757.945,00
Anggaran		(6)	46.322.809.000,00	13,497,000,000,00	19.733.698.000,00	13.092.111.000,00	14.355.990.600,00	40.585.600,00	14.315.405.000,00	1.492.245.000,00	1.492.245.000,00	72.885.583.300,00
Dukungan program dan	Kegiatan	(8)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1 Perencanaan dan Pembangunan Penataan Kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat	2 Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage	3 Penataan Kawasan Gasibu Tahap II	Program Sumber Daya Kesehatan	1 Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru RS Paru Provinsi Jawa Barat	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat	Program Pengembangan Nilai Budaya	1 Penyusunan DED Museum Jatigede	Program Pengembangan
Capaian Terhadap Indikator	irja 16											
S = E	Kinerja 2016	(7)										100%
!_	2016 Kine 201	(7)										92,78% 100%
* Realisasi"												
Realisasi"	2016 2016	(9)										92,78%
Target* Realisasi"	2016 2016	(5) (6)										92,78%
Target* Realisasi" .	2016 2016	(4) (5) (6)										92,78%



# DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT III-17



	Fisik	(11)		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	68.84%	100.00%	100.00%
Realisasi	Keuangan	(10)		956.145.100,00	70.904.000,00	285.747.000,00	476.198.500,00	1.018.125.693,00	357.163.321,00	873.534.500,00
Anggaran	}	(6)		967.981.000,00	87.609.000,00	287.007.000,00	481.867.000,00	1.765.432.500,00	457.796.500,00	938.367.500,00
Dukungan program dan	Neglatan	(8)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Kajian Lingkungan Pembangunan RUSUNAWA di Kab. Bandung Barat dan Kota Bogor	2 Monitoring dan Verfikasi Bantuan Gubemur Bidang Permukinan dan Perumahan	3 Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan	4 Perencanaan dan Identifikasi Lokasi Pembangunan Rusunawa di KSP Jatinangor, Kotafkab. Sukabumi dan Kafofkota. Cirebon	5 RTLH_Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	6 Pendataan Bidang Perumahan di Jawa Barat	7 METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bandung
					I		ı		1	
Capaian Terhadap Indikator	Kinerja 2016	(7)								
	2016 Kinerja 2016	(2) (9)								
* Realisasi"										
Realisasi"	2016 2016	(9)								
Target* Realisasi*	2016 2016	(5) (6)	Cakupan ketersediaan ketersediaan	ruman layak nuni						
Target Realisasi" Satuan	2016 2016	(4) (5) (6)	an Rumah	Layak nuni ruman layak nuni						





•	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target*	Realisasi" 2016	Capalan Terhadap Indikator	Duk	Dukungan program dan Keciatan	Anggaran	Realisasi		
				2010	2010	Kinerja 2016				Keuangan	Fisik	
	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(7)		(8)	(6)	(10)	(11)	
							ω	METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Cirebon Raya	974.226.000,00	923.770.750,00	100.00%	
							თ	METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bodebekkarpur	1.092.885.000,00	1.030.140.000,00	100.00%	
							10	PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran	486.568.000,00	469.803.676,00	100.00%	
							=	PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan	480.826,000,00	463.606.000,00	100.00%	
							12	PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya	472.972.000,00	457.118.959,00	100.00%	
							13	Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat	64.392.045.800,00	35.004.500.446,00	92.06%	
							Prog Penç Infra Perr	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	5.590.716.800,00	5.275.269.500,00	94,36%	





Realisasi Anggaran	Keuangan Fisik	(11) (10) (11)	5.590.716.800,00 5.275.269.500,00 100.00%	3.686.187.600,00 3.119.368.490,00 84,62%	2.418.000.000,00 2.089.684.150,00 86,42%	1.495.000,000,00 1.370,291,650,00 98.60%	923.000,000,00 719.392.500,00 100.00%	462.536.600,00 340.991.340,00 73,72%	462.536.600,00 340.991.340,00 100.00%	805.651.000,00 688.693.000,00 85,48%	805.651.000,00 688.693.000,00 86.49%
Dukungan program dan	Neglatari Marana	(8)	1 Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1 Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2 Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Peningkatan dan Pelayanan BPMKL	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1 Pembinaan Teknis
Capaian Terhadap Indikator	Kinerja 2016	(7)		ian Mutu	162,10%			293,56%		100,00%	
Realisasi"	2016	(9)		sarkan Pengujian Mutu	50,25			3.875		80	
Target*	2U16	(2)		ruksi Berdas	34			1.320		08	
Satuan		(4)		Jasa Konst cualitas.	%			Sampel		%	
Indikator Kinerja		(3)		Misi 3: Meningkatkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berdasarl Konstruksi dan Lingkungan yang Berkualitas.	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertikat			Jumlah contoh uji yang dapat dilayani		Kepuasan instansi yang mendapatkan	bantuan teknis
Sasaran		(2)		i 3: Meningkatkan Te Konstruksi dan l	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban	penyelenggaraan jasa konstruiksi baik	penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan	lingkungan yang optimal	Meningkatnya kinerja pengelolaan	bangunan,





Fisi <del>k</del>	(11)	78,34%	97.72%	97.77%	100.00%	100.00%	83,71%	98.27%	93.09%
Realisasi Keuangan	(10)	1.505.196.323,00	1.258.533.300,00	152.990.023,00	69.673.000,00	24.000.000,00	7.026.303.094,00	1.772.874.890,00	1.875.361.937,00
Anggaran	(6)	1.921.332.400,00	1.577.638.400,00	242.550.000,00	74.144.000,00	27,000,000,00	8.393.552.300,00	1.830.786.000,00	2.337.620.300,00
Dukungan program dan Kegiatan	(8)	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	1 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	2 Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPMKL- Diskimrum	3 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3JB	4 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSR	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3JB	2 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPMKL- Diskimrum
Capaian Terhadap Indikator Kinerja	2016 (7)	162,50%					91,76%		
Realisasi**	(9)	65					78		
Target* 2016	(2)	40					88		
Satuan	(4)	Orang					%		
Indikator Kinerja	(3)	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di	Bidang Pelayanan				Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Dinas Permukiman dan Perumahan	
Sasaran	(2)	Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang	handal				Pelayanan Prima Dinas		
	E	10					=		





Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2016 2016 (Finerja Zoff Control Kegiatan Anggaran Kegiatan Control Marinistasis Innas Permukan Polnis Permukan Polniskan Permukan Polniskan Permukan Polniskan Permukan Regiatan Kinerja dar Ketangan Ketangan Ketangan Ketangan Ketangan Ketangan Ketangan Ketangan Regiator Permukan Salaran Basaran Permukan Aparatur Permukan Aparatur Permukan Repurmban Polniskan Permukan Repurmban Polniskan Permukan Repurmban Polnis Permukan Repurmban Polnis Permukan Repurmban Polnis Permukan Polniskan Polniskan Permukan Repurmban Polniskan Permukan Permukan Repurmban Polniskan Permukan Repurmban Polniskan Permukan Repurmban Polniskan Permukan Pe											
(3) (4) (5) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	·			.,	Target*	Realisasi"	Capalan Terhadap	Dukungan program dan		Realisasi	
(5) (4) (5) (7) Revyelenggaraan Administrasi Perkatricran Dinas Perkatricran Dinas Perkatricran Dinas Perunahan Provinsi Jawa Barat Administrasi Perkatricran BPSR Program Perependalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pengendalian dan Program Pengendalian Administrasi Discerah Pengendalian Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Capalian Kinerja dan Keuargaan Capalian Kinerja dan Reurangan Aparatur Pengembangan Sistem Pelaporan Gapalian Kinerja dan Pesarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Presarana Aparatur Aparatur Peningkatan Sarana dan Presarana Aparatur Aparatur Peningkatan Sarana dan Presarana Brakana Banat Aparatur Banat Bana	,	asarall	markator Minerja	Satuali	2016	2016	Kinerja 2016	Kegiatan	Anggaran	Keuangan	Fisik
E. 82 E. 7. E. S.		(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)
8. 24 K. 7 K. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.								Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Permukiman Perumahan Pr Jawa Barat	3.588.016.000,00	2.763.582.351,00	82.00%
999 7.341.									637.130.000,00	614.483.916,00	100.00%
7.341.								Program Perencanaan,	99.336.850,00	83.489.850,00	84,05%
79.								Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah			
								1 Perencanaan Lingkup Bidang Permukiman dan Perumahan	99.336.850,00	83.489.850,00	98.19%
7.3								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	79.800.000,00	66.139.400,00	82,88%
7.3								1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal	79.800.000,00	66.139.400,00	100.00%
Peningkatan Sarana dan Prasarana BPSR (Revitalisasi) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.341.420.650,00	7.152.268.407,00	97,42%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat								<u> </u>	351.570.000,00	336.970.100,00	100.00%
15 15 A 5 1 5 5								Peningkatan dan Prasarana Dinas Permukin Perumahan Jawa Barat	3.914.796.300,00	3.800.438.100,00	%29.65



# DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT III-23

				Target*	Realisasi"	Terhadap	Dukungan program dan	,	Realisasi	
o Z	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2016	Indikator Kinerja 2016	Kegiatan	Anggaran	Keuangan	Fisik
£	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)
							3 Peningkatan Sarana dan Prasarana BP3JB	795.702.500,00	764.091.917,00	%68.36
							4 Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur BPMKL-Diskimrum	2.279.351.850,00	2.250.768.290,00	100.00%
							Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.155.720.100,00	18.588.063.300,00	83,90%
							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPSR	11.666.007.000,00	8.669.214.650,00	%69.96
							2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	5,293,901,200,00	5.010.597.050,00	99.15%
							3 Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3.850.836.500,00	3.758.537.632,00	98.82%
							4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran BPMKL	1.344.975.400,00	1.149.713.968,00	97.75%
							Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	98.440.000,00	88.766.750,00	90,17%
							Pengelolaan Keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan	98.440.000,00	88.766.750,00	80.69%
							JUMLAH	303.756.790.350,00	226.905.257.382,00	74,70%

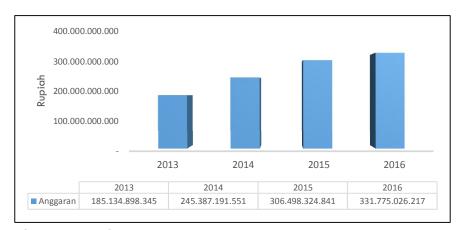






### 3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana telah dibahas pada Bab II, bahwa anggaran setelah perubahan ternyata lebih besar daripada jumlah usulan anggaran yang direncanakan yaitu menjadi Rp 331.775.026.217,00. Hal ini menunjukan bahwa terdapat tambahan input kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Besarnya sumber daya yang digunakan pada tahun 2016 merupakan bagian dari trend/perkembangan peningkatan anggaran Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat sejak Periode 2013-2016.



Gambar III. 3 Sandingan Jumlah Anggaran Tahun 2013-2016 Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Seiring dengan terjadinya peninggakatan sumber daya keuangan maka diharapkan pula terjadi peningkatan pencapaian target indikator, misi, dan realisasi fisik dan keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Tentunya peningkatan capaian ini telah terukur sebagaimana disajikan dalam Gambar III.1. Adapun realisasi fisik dan keuangan tahun Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016 ditunukan seperti pada Tabel III.6.







Tabel III. 6 Rekapitulasi Progres Keuangan dan Fisik Diskimrum Perjenis Belanja T.A. 2016

		BOBOT	REALISASI	ISASI Pencapaian %	an %
NO UKAIAN KEGIALAN	ANGGAKAN (KP)		KEUANGAN (Rp)	Keuangan	Fisik
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(9)	_ ( <u>}</u>
1 BELANJA LANGSUNG					
1. Belanja Pegawai	2.908.120.000,00	96'0 00	2.440.170.000,00	83,91	107,48
2. Belanja Barang/Jasa	112.367.657.800,00	66'98 00	92.181.009.745,00	82,04	95,18
3. Belanja Modal	188.480.994.550,00	00 62,05	132.284.077.637,00	70,18	89,46
JUMLAH	303.756.772.350,00	100,00	226.905.257.382,00	74,70	91,75
JUMLAH TERHADAP DINAS (%)	91,56	36		68,39	84,00
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG					
1. Belanja Pegawai	28.018.235.867,00	00,001	27.687.196.867,00	98,82	98,82
JUMLAH	28.018.235.867,00	100,00	27.687.196.867,00	98,82	98,82
JUMLAH TERHADAP DINAS (%)	8,44	4		8,35	8,35
TOTAL ANGGARAN	331.775.008.217,00	00 100,00	254.592.454.249,00	76,74	93,08

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016, Sekretariat Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat







Seperti telah dibahas pada Sub Bab 3.1.5 tentang program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian setiap indikator kinerja, pada sub bab ini akan dibahas secara khusus mengenai analisa realiasi kuangan yang dibahas melalui pendekatan SILPA yang terjadi pada kegiatan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Sebagaimana ditunjukan pada Tabel III.6, diketahui bahwa realisasi keuangan pada tahun 2016 mencapai 76,74 %.

Pada belanja pegawai terjadi SILPA sebesar Rp 798.989.003. Nilai tersebut berasal honorarium PPK/panitia/pejabat pengadaan barang jasa/pemeriksa/penerima hasil pekerjaan dengan SILPA sebesar Rp 364.300.000 terjadi karena penyesuaian tarif untuk honorarium Pokja/pejabat pengadaan/penerima hasil pekerjaan dan honorarium Pokja/pejabat pengadaan/penerima hasil pekerjaan dari paket yang tidak dilaksanakan. SILPA sebesar Rp 103.650.000 terjadi pada uang saku/pengganti transport/honorarium PNS Non Provinsi atau peserta rapat non PNS Kab/Kota, hal ini terjadi karena anggaran yang ada dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir. Selain itu SILPA bersumber dari belanja tidak langsung (gaji atau tunjangan pegawai) dengan SILPA sebesar Rp 331.039.003 yang terjadi karena adanya potongan tunjangan/gaji/pajak dll.

Pada belanja barang dan Jasa terjadi SILPA sebesar Rp 20.186.666.055. Nilai tersebut berasal dari kegiatan Penyusunan RISPAM Jawa Barat. Pada kegiatan tersebut terdapat alokasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka Penyusunan RISPAM Jawa Barat, namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu sehingga menyebabkan terjadinya SILPA sebesar 602.780.000. Pada kegiatan pengembangan SPAM Perdesaan terdapat SILPA sebesar 288.825.000. Pada pembangunan masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gede Bage terdapat SIPLA sebesar Rp 168.144.225. Selain itu pada penyelenggaraan administrasi perkantoran Dinas Permukiman dan perumahan Provinsi Jawa Barat terjadi SILPA sebesar Rp 155.751.832. Pada kegiatan konsep pembangunan Public Art Work Sister Province Jawa Barat dan Australia Selatan terjadi SILPA sebesar Rp 100.000.000. Pada kegiatan Pembangunan Masjid Raya Provinsi jawa Barat di Gede Bage terjadi SILPA sebesar Rp 151.733.075 yaitu pada aktivitas perjalanan Dinas PNS Non Provinsi. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem penyediaan air minum jawa Barta Rp 125.075.000 yaitu pada aktivitas perjalanan Dinas Non PNS.

Pada belanja modal terjadi SILPA sebesar 56.189.290.713. SILPA tersebut dapat dirincikan berdasarkan paket pengadaan jasa konstruksi dan paket pengadaan barang. Pada paket pengadaan jasa konstruksi terjadi







SILPA sebesar Rp 51.747.240.470, yang berasal dari sisa lelang Rumah Sakit Pameungpeuk sebesar Rp 904.527.588, jaringan air bersih TPPAS Regional Legok Nangka sebesar Rp 521.502.900. Pada kegiatan Monumen perjuangan terjadi SILPA sebesar Rp 11.358.275.000 terjadi karena menunggu hasil kajian BIUTR. Pada pematangan lahan mesjid raya Gede Bage terjadi SILPA sebesar Rp 6.671.893.000 karena keterbatasan lahan. Pada pembangunan gasibu terjadi SILPA sebesar Rp 4.116.409.000 yang dikarenakan putus kontrak (kontraktor wanprestasi). Pada pembangunan Masjid Pangandaran dan Cikembar Sukabumi terjadi addendum kurang karena terjadi gagal lelang. Pada pembangunan Masjid Rancabuaya terjadi pemutusan kontrak karena kontraktor yang wanprestasi, dan pada pembangunan masjid Plumbon terjadi addendum kurang sehingga terjadi SILPA sebesar Rp 27.731.465.58. Sedangkan ditinjau dari paket pengadaan barang, terjadi SILPA sebesar Rp 3.553.708.000 yang terjadi karena penyesuaian dalam pengadaan tenda PON XIX 2016.





### PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi pelayanan OPD pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. LKIP disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 2015-2018. Besarnya rata-rata capaian keluaran pada tahun 2016 adalah sebesar 69,05 %, atau terkategori Cukup.

Misi I : Meningkatkan Kinerja Penataan Ruang yang Berkualitas dan Implementatif. Ketercapaian misi I pada Tahun 2016 mencapai 89,52% atau terkategori baik.

Pada Tujuan 1 sasaran strategis 1 "Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat" tingkat ketercapaian sasaran sebesar 83,33% dengan predikat baik. Ketercapaian sasaran strategis tersebut merupakan hasil pengukuran dari capaian indikator kinerja indikator kinerja jumlah ketersediaan Kajian Perda RTR KSP di Jawa Barat yang terealiasi sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen. Selain itu terukur dari indikator jumlah ketersediaan kajian Perda RDTR Kabupaten Kota di Jawa Barat sebanyak 2 dokumen dari target 3 dokumen. Pada tujuan 1 sasaran 2 "terselenggaranya pemanfaatan ruang berkelanjutan" yang ketercapaian sasaran sebesar 95,71% dengan predikat baik. Ketercapaian sasaran strategis tersebut merupakan hasil pengukuran dari capaian indikator kinerja persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara sebesar 67% dari target 70%.

Misi II : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan dan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman. Ketercapaian misi II pada Tahun 2016 mencapai 100,39% atau terkategori sangat baik. Pada tujuan 1 sasaran strategis 1 "Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak" tingkat ketercapaian sasaran sebesar 101,63% dengan predikat sangat baik. Ketercapaian sasaran strategis tersebut merupakan hasil pengukuran dari capaian indikator kinerjacakupan pelayanan air minum sebesar 71,14% dari target 70%. Pada tujuan 1 sasaran strategis 2







"Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak" tingkat ketercapaian sasaran sebesar 99,94% dengan predikat sedang. Ketercapaian sasaran strategis tersebut merupakan hasil pengukuran dari capaian indikator kinerja cakupan pelayanan air limbah domestik sebesar 65,64% dari target 65% dan dari capaian indikator kinerja cakupan pelayanan persampahan perkotaan sebesar 66,26 % dari target 67%. Pada sasaran strategis 3 "Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di jawa Barat" tingkat ketercapaian sasaran sebesar 100 % dengan predikat sangat baik. Ketercapaian sasaran strategis tersebut merupakan hasil pengukuran dari capaian indikator kinerja luas kawasan ruang terbuka hijau/ruang terbuka publik/revitalisasi kawasan sebanyak 2 kawasan dari target 2 kawasan. Pada sasaran strategis 4 "Meningkatkan Jumlah Rumah Layak huni" tingkat ketercapaian sasaran sebesar 100 % dengan predikat sangat baik. Ketercapaian sasaran strategis tersebut merupakan hasil pengukuran dari capaian indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 92,78% dari target 92,78%.

Misi III : Meningkatkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan yang Berkualitas. Ketercapaian misi III pada Tahun 2016 mencapai 158,20% atau terkategori sangat baik. Pada sasaran strategis 1 "Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi" tingkat ketercapaian sasaran mencapai 81,05%. Ketercapaian sasaran tersebut terukur dari indiktaor indikator kinerja persentase SDM jasa konstruksi yang bersertikat sebesar 50,25% dari target 31%. Pada sasaran strategis 2 "Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan yang optimal", ketercapaiannya adalah 293,56%, yang merupakan hasil pengukuran dari capaian indikator kinerja jumlah contoh uji yang dapat dilayani sebanyak 3.875 sampel dari target 1.320 sampel. Pada sasaran strategis 3 "Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara", ketercapaiannya adalah 100%, yang merupakan hasil pengukuran dari capaian indikator kinerja kepuasan instansi mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah sebesar 80% dari target 80%.

Misi IV : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Prinsip Good Governance. Ketercapaian misi IV pada Tahun 2016 mencapai **127,13%** atau terkategori **sangat baik**. Pada sasaran strategis 1 "Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal"







ketercapaiannya adalah 162,50%, yang merupakan hasil pengukuran dari capaian indikator kinerja jumlah SDM aparatur yang bersertifikat di bidang pelayanan sebanyak 65 orang dari target 40 orang. Pada sasaran strategis 2 "pelayanan prima dinas" ketercapaiannya adalah 91,76%, yang merupakan hasil pengukuran dari capaian indikator kinerja kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas permukiman dan perumahan sebesar 78 persen dari target 85 persen.







### LAMPIRAN





### PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAN DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

Jalan Kawaluyaan Indah No.4 Telp. (022) 7319712 - 7319735 Fax. (022) 7313675 Bandung - 40286

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman dan perumahan

berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

FUNGSI : a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan

perumahan.

b. Penyelenggaraan urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi

tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi. c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas b

permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman,

perumahan, dan jasa konstruksi.

d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2 Meningkatnya Ketersediaan	3 Jumlah Ketersediaan	4 Mengukur kinerja organisasi dalam perencanaan, pemanfaatan dan	5 Laporan pelaksanaan	6 Kepala Dinas
	Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat	Perda RTR KSP di Jawa Barat	pengendalian pemanfaatan tata ruang di Jawa Barat	dan evaluasi	
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Cakupan Pelayanan Air Minum	Jumlah Penduduk yang mendapat akses terhadap prasarana dan sarana air minum yang layak, dengan rumus:	Laporan pelaksanaan dan evaluasi	Kepala Dinas
	ketersediaan air minum yang layak		Jumlah penduduk berakses air minum layak =x 100 % Jumlah seluruh penduduk		
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Jumlah Penduduk yang mendapat akses terhadap prasarana dan sarana sanitasi yang layak, dengan rumus:	Laporan pelaksanaan dan evaluasi	Kepala Dinas
	dan prasarana sanitasi yang layak		Jumlah penduduk berakses sarana air limbah domestik layak =x 100 % Jumlah seluruh penduduk		
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana	Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Jumlah Penduduk yang mendapat akses terhadap prasarana dan sarana persampahan yang layak, dengan rumus:	Laporan pelaksanaan dan evaluasi	Kepala Dinas
	dan prasarana sanitasi yang layak		Jumlah penduduk berakses sarana persampahan =x 100% Jumlah seluruh penduduk		



					·ocu-t
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI SUMBER DATA		PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatkan Jumlah Rumah Layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni, dengan rumus:  Jumlah rumah layak huni  = x100%  Jumlah seluruh rumah	Laporan pelaksanaan dan evaluasi	Kepala Dinas
6	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruiksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	Persentase Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi yang bersertikat	Mengukur kinerja Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Bidang Jasa Konstruksi di Jawa Barat	Laporan pelaksanaan dan evaluasi	Kepala Dinas

Bandung, 2015 KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. BAMBANG RIANTO, M.Sc.

Pembina Utama Muda NIP 19620116 199103 1 004







### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Ir. BAMBANG RIANTO, M.Sc.

Jabatan

: KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama

: AHMAD HERYAWAN

Jabatan

: GUBERNUR JAWA BARAT

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA.

HMAD HERVAMAN

PIHAK KESATU,

Ir. BAMBANG RIANTO, M.Sc. Pembina Utama Muda NIP 19620116 199103 1 004





### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat	Jumlah Ketersediaan kajian Perda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Jawa Barat	1 Dokumen
		Jumlah Ketersediaan Kajian Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota di Jawa Barat	3 Dokumen
2.	Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bandung Utara	70 %
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Cakupan Pelayanan Air Minum	70%
4.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	65 %
		Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	67 %
5.	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di jawa Barat	Jumlah kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	2 Kawasan
6.	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,78 %
7.	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruiksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	Persentase Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi yang bersertifikat	31 %
8.	Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan yang optimal	Jumlah contoh uji yang dapat dilayani	1.320 Sampel
9.	Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung/rumah negara	80 %
10.	Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan	40 Orang





### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
11.	Pelayan Prima Dinas	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	85 %	

No.	Program		Anggaran	Ket.
1.	Program Sumber Daya Kesehatan	Rp	14.355.990.600	P-APBD
2.	Program Pembinaan dan	Rp	105.709.661.350	P-APBD
	Pengembangan Infrastruktur		* 1 m	
	Permukiman			
3.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Rp	3.223.651.000	P-APBD
4.	Program Penataan Ruang	Rp	5.565.643.000	P-APBD
5.	Program Perencanaan Pengendalian	Rp	99.336.850	P-APBD
	dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
6.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	72.885.583.300	P-APBD
	dan Kawasan Permukiman			
7.	Program Pembinaan, Pemasyarakatan,	Rp	59.971.877.200	P-APBD
	dan Pengembangan Olahraga			
8.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp	1.492.245.000	P-APBD

Bandung, 14 November 2016

**GUBERNUR JAWA BARAT** 

KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

Ir. BAMBANG RIANTO, M.Sc. Pembina Utama Muda NIP 19620116 199103 1 004





Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Dine	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat							
NO	SASARAN	INDIKA	INDIKATOR KINERJA		KETERANGAN			
	STRATEGIS	URAIAN	TARGET	SATUAN				
		nerja Penataan Ruang yan	g Berkualitas dan lı	mplementati I				
1	Meningkatnya Ketersediaan	Jumlah Ketersediaan	1	Dokumen	Penyusunan N	askah Akademis dan Raperda RTR KSP		
	Rencana Penataan	Perda RTR KSP di Jawa	'	Dokumen	Sukabumi Baq			
	Ruang di Jawa	Barat				naan Kawasan Perkotaan Gunung Sindur		
	Barat				Kabupaten Bo			
					METR Perenca Cirebon	naan Kawasan Perkotaan Water Front City		
						naan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan		
					Jatinangor			
						naan Pengembangan Ciletuh Bidang		
						an Perumahan udi Kelayakan Penataan Karst Citatah		
						enyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Jawa		
					Barat	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
					ogram Penataan			
		Jumlah Ketersediaan	3	Dokumen		enyusunan Rencana Rinci Tata Ruang		
		Perda RDTR Kabupaten Kota di Jawa Barat			Kabupaten/Ko	ota		
2	Terselenggaranya	ikola di Jawa Balai			ogram Penataan	Ruang		
	pemanfaatan ruang	Persentasi kesesuaian	70	%	Pengembanga	ın Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Hasil Review		
	yang berkelanjutan	pemanfaatan ruang di			RTRWP Jawa			
		KSP Bandung Utara			Pengawasan o Barat	dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa		
						kan Kawasan Perkotaan Kota Raya Walini		
						·		
		tersediaan dan Kualitas Pe	erumahan dan Pras	arana dan S				
3	Meningkatnya akses				ogram Pembinad rmukiman	an dan Pengembangan Infrastruktur		
	masyarakat terhadap	Cakupan Pelayanan Air	70	%		ın SPAM Perdesaan		
	ketersediaan air	Minum		,,,		n Evaluasi Pengembangan Sistem Penyediaan		
	minum yang layak				Air Minum Jaw	va Barat		
					_	bangan SPAM Metropolitan Bandung Raya		
						nan Rencana Induk SPAM Jawa Barat		
4	Meningkatnya					ebijakan SPAM Jawa Barat an dan Pengembangan Infrastruktur		
	akses masyarakat				rmukiman	an dan i engembangan mirasirokioi		
	terhadap sarana	Cakupan Pelayanan Air	65	%	METR-Penyusu	nan Review Rencana Induk Drainase dan Air		
	dan prasarana	Limbah Domestik				aan di Metropolitan Bandung Raya		
	sanitasi yang layak					ng dan Evaluasi Teknis Pengelolaan Sanitasi a Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum		
						ng dan Evaluasi Teknis Pembangunan Sanitasi		
					Jawa Barat			
						an Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan		
					Persampahan	Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran		
					METR - Penyus	sunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah		
						Metropolitan Cirebon Raya		
						sunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah		
						Metropolitan Bodebekkarpur angunan Public Art Work Sister Province Jawa		
					Barat dan Aus	·		
					,	an Rencana Induk Drainase, Air Limbah, dan		
					Persampahan	Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Palabuhan Ratu		
					PPP - Penyusu	nan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan		
						Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya		
					ogram Pembinad rmukiman	an dan Pengembangan Infrastruktur		
		Cakupan Pelayanan	67	%		TPPAS Regional Legok Nangka		
		Persampahan Perkotaan			_	TPPAS Regional Nambo		
					Pengelolaan T			
					Advisory tekni			
						encana Induk Persampahan dan TPPAS Regiona		
					Ciayumajakun Penataan TPA			
5	Meningkatnya luas					an, Pemasyarakatan dan Pengembangan		
	ruang terbuka hijau				ah Raga			
	di jawa Barat	Luas kawasan Ruang	2	Kawasan		iapan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan		
		Terbuka Hijau/Ruang Terbuka				arana dan Prasarana Non Permanen Pendukung IX Tahun 2016 Jawa Barat		
		Publik/Revitalisasi				vediaan Sarana dan Prasarana		
		Kawasan			Penyelenggar	aan PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat		
						an dan Pengembangan Infrastruktur		
ì	1			I	rmukiman			





No-	SASARAN	INDIKA	ATOR KINERJA		KETERANGAN		
NO	STRATEGIS	URAIAN	TARGET	SATUAN	KETERANGAN		
					1 Perencanaan dan Pembangunan Penataan Kawasan Monumer		
					Perjuangan Jawa Barat  Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage		
					3 Penataan Kawasan Gasibu Tahap II		
					Program Sumber Daya Kesehatan		
					Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru RS Paru     Provinsi Jawa Barat		
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah		
					Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat Program Pengembangan Nilai Budaya		
					1 Penyusunan DED Museum Jatigede		
6	Meningkatkan				Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan		
	Jumlah Rumah Layak huni	Cakupan ketersediaan	92,78	%	Permukiman  1 Kajian Lingkungan Pembangunan RUSUNAWA di Kab.		
	•	rumah layak huni			Bandung Barat dan Kota Bogor  2 Monitoring dan Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang		
					Monitoring dan Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang     Permukiman dan Perumahan		
					3 Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan		
					4 Perencanaan dan Identifikasi Lokasi Pembangunan Rusunawa		
					di KSP Jatinangor, Kota/Kab. Sukabumi dan Kab/Kota. Cirebon		
					5 RTLH - Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni		
					Perkotaan 6 Pendataan Bidang Perumahan di Jawa Barat		
					7 METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di		
					Metropolitan Bandung Raya  8 METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di		
					Metropolitan Cirebon Raya		
					METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di     Metropolitan Bodebekkarpur		
					10 PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat		
					Pertumbuhan Pangandaran 11 PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat		
					Pertumbuhan Pelabuhan Ratu		
					12 PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya		
					13 Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat		
					Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman		
					1 Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa		
Misi	3: Meningkatkan Ter	tib Penyelenggaraan Jasa	Konstruksi Berdase	arkan			
7	Meningkatnya kemampuan dan	Persentase SDM Jasa	31	%	Program Pembinaan Jasa Konstruksi  1 Pemberdayaan Jasa Konstruksi		
	ketertiban	Konstruksi yang bersertikat	31	70	Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi		
8	Terwujudnya				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	pelayanan uji mutu konstruksi dan	Jumlah contoh uji yang dapat dilayani	1.320	Sampel	1 Peningkatan dan Pelayanan BPMKL		
9	Meningkatnya				Program Pembinaan Jasa Konstruksi		
	kinerja pengelolaan bangunan,	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan	80	%	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan     Gedung/Rumah Negara		
	gedung/rumah	teknis pengelolaan			Codesig/ Roman / Rogard		
	negara	bangunan gedung negara/daerah					
		nerja Penyelenggaraan Pe	merintahan berdas	arkan			
10	Mewujudkan SDM aparatur, sarana	Jumlah SDM Aparatur	40	Orang	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur  1 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas		
		yang bersertifikat di			Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat		
	handal	Bidang Pelayanan			Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas Sumber Daya     Aparatur BPMKL-Diskimrum		
					3 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3JB		
					4 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSR		
<u>.</u>	D-1						
11	Pelayanan Prima Dinas	Kepuasan masyarakat	85	%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  1 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3JB		
		terhadap pelayanan Dinas			Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPMKL-Diskimrum		
		Permukiman dan Perumahan			3 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman		
					dan Perumahan Provinsi Jawa Barat		
					4 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPSR Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi		
					Pembangunan Daerah		
					Perencanaan Lingkup Bidang Permukiman dan Perumahan     Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		
					Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal		
I					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		





NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			KETERANGAN		
	STRATEGIS	URAIAN	TARGET	SATUAN			
					1	Peningkatan Sarana dan Prasarana BPSR (Revitalisasi)	
					2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	
					3	Peningkatan Sarana dan Prasarana BP3JB	
					4	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur BPMKL- Diskimrum	
					Prog	gram Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	
					1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPSR	
					2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	
					3	Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
					4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran BPMKL	
					Prog	gram Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	
					1	Pengelolaan Keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan	